BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN KAUR

SELASA, 21 MEI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Masih Berkutat dengan WDP

KOTA BINTUHAN - Pemerintah Kabupaten Kaur kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 yang lalu.

Kendati belum bisa meraih WTP untuk LKPD tahun 2018, namun Pemkab Kaur tetap bersyukur karena berhasil mempertahankan WDP tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kaur Lawi Amrul, M.Si, Senin (20/5). Sesaat usai mendampingi Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos, M.AP menerima opini WDP tersebut.

Lawi Amrul menjelaskan bahwa salah satu yang mengganjal Kaur untuk meraih WTP adalah masih ada kelemahan di sistem laporan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itu Lawi berharap kedepannya bisa menjadi perhatian dari setiap OPD untuk lebih baik lagi.

"Alhamdulilah kita tahun ini masih bisa mendapatkan WDP dalam laporan keuangan. Ini akan jadi bahan evaluasi kita bersama di jajaran Pemkab Kaur untuk lebih memperhatikan sistem laporan keuangan agar lebih baik lagi. Karena persoalannya masih ada beberapa OPD yang laporan keuangannya belum maksimal, sehingga kita belum bisa mendapatkan WTP," pungkas Lawi Amrul kemarin.

Untuk diketahui, Kabupaten Kaur sudah dua tahun ini mendapatkan opini WDP dari BPK RI. Ke depan Lawi, berharap agar Kaur bisa merebut opini WTP yang selama ini selalu didapat Kaur. Untuk itu butuh keseriusan dari setiap OPD untuk menyampaikan laporan keuangan secara benar setiap tahunya.

"Yang pasti ke depan akan terus kita perbaiki lagi, agar bisa mendapatkan WTP kembali," pungkas Lawi. (**cik**)